

# Analisis Wacana Keberlanjutan Kepemimpinan Nasional Sebagai Praktik Oligarkis Dalam Pidato Presiden Jokowi Menjelang Pemilu 2024

Priyo Wicaksono<sup>1</sup>, Adi Bayu Mahadian<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, priyowicaksono@student.telkomuniversity.ac.id

<sup>2</sup> Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, adibayumahadian@telkomuniversity.ac.id

## Abstract

Political elites carry out political dynamics, and political safaris, and dismantle the nominating coalition. Jokowi as a state official and political official who is still active, has contributed to the political dynamics ahead of the 2024 elections. Jokowi's figure is very central, this is based on Jokowi's ability to embrace or eliminate 2019 political opponents to join the Government coalition. Political speeches as part of political communication are a source for understanding the direction of government policy and Jokowi's views on strategic issues faced by Indonesia ahead of the 2024 elections. This research uses a qualitative, descriptive approach with Teun a Van Dijk's Critical Discourse Analysis Model to examine why this discourse has become Jokowi's presidential agenda. The findings of this research are that democratic practices based on oligarchy can be sourced from the fame of public officials who pioneered from the grassroots or without the influence of wealth and became a force. This analysis can contribute ideas in the context of leadership continuity discourse that President Jokowi has a variety of varied diction. social context is good at exercising influence to strengthen the existence of feudalism, oligarchy, and democracy in the second period, the findings on the social cognition part of President Jokowi are trying to reduce polarization.

Keywords-president jokowi, oligarchy, politik, elections 2024

## Abstrak

Para elit politik melakukan dinamika politik, safari politik, dan bongkar pasang koalisi pengusungan. Sebagai pejabat negara dan politik yang aktif, Jokowi berkontribusi pada dinamika politik menjelang pemilu 2024. Jokowi memiliki figur sentral berdasarkan kemampuannya untuk merangkul atau menyingkirkan lawan politik 2019 untuk bergabung dalam koalisi. Pidato politik sebagai bagian dari komunikasi politik menjadi sumber untuk memahami arah kebijakan pemerintah dan pandangan Jokowi terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia menjelang pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model analisis wacana kritis Teun A Van Dijk untuk melihat mengapa wacana ini menjadi agenda kepresidenan Jokowi. Penelitian ini menemukan bahwa praktik demokrasi yang berbasis oligarki dapat bersumber dari ketenaran pejabat publik yang merintis dari akar rumput atau tanpa dipengaruhi oleh kekayaan dan menjadi sebuah kekuatan. Analisis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai wacana kesinambungan kepemimpinan bahwa Presiden Jokowi memiliki berbagai diksi. Dalam konteks sosial ia pandai mempengaruhi untuk memperkuat eksistensi feodalisme, oligarki, dan demokrasi di periode kedua, temuan pada bagian kognisi sosial Presiden Jokowi berusaha meredam polarisasi.

Kata Kunci-president Jokowi, pemilu 2024, politik, oligarki

## I. PENDAHULUAN

Menjelang Pemilu 2024 dinamika politik tersebut dimulai, dengan partai Nasdem notaben sebagai koalisi aktif pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Membuat keputusan politik dengan membentuk koalisi baru bersama PKS, dan Demokrat, dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Jokowi merespon dengan melihatkan dominasi kesentralan yang dimiliki. Tendensinya terlihat ketika mengundang atau berkonsolidasi dengan enam partai politik koalisi pemerintah dan meninggalkan Nasdem yang notabennya sudah membentuk koalisi baru. Hal tersebut menguatkan adanya dinamika kepentingan politik yang dilakukan para elite politik dan termasuk Presiden Jokowi (Efriza, 2022).

Common Denominator dalam pembentukan koalisi periode kedua Presiden Jokowi diinisiasi atau bertujuan adanya pembagian kekuasaan (Efriza, 2022). Bahwasanya harapan demokrasi menghasilkan calon pemimpin yang dipilih hasil meritokrasi (Gunanto, 2020) bukan pemimpin hasil dari patronase politik. Hal tersebut menunjukkan relasi kuasa memiliki peranan kuat yang digunakan sebagai alat elite politik untuk berkoalisi, dan menyodorkan nama calon pemimpin kepada masyarakat.

Pemilihan presiden menjadi ajang transformasi penyegaran estafet kepemimpinan, melanjutkan pembangunan bangsa yang dilakukan presiden sebelumnya yang berorientasi berkelanjutan yang lebih baik. Hal tersebut membuat

para elite politik melakukan dinamika politik, safari politik, sampai bongkar pasang koalisi pencalonan. Jokowi selaku pejabat negara dan pejabat politik yang masih aktif, ikut memberikan kontribusi berdinamika politik menjelang pemilu 2024. Sosok Jokowi sangatlah sentral, hal tersebut didasari kemampuan Jokowi merangkul atau mengeliminasi lawan politik 2019 untuk bergabung dengan koalisi Pemerintahan (Jati, 2021). Sebagai contoh, Jokowi memiliki relasi dengan ketua umum partai nasional yang tergabung pada koalisi pemerintahan seperti Gerindra, PAN, Golkar, PPP, Nasdem, PDI Perjuangan, PKB. Hal tersebut tidak mencerminkan demokrasi yang baik, dalam proses demokrasi peran pengawasan dibutuhkan melalui tim oposisi yang juga memiliki power sama kuat untuk menyuarakan kritik terhadap jalannya pemerintahan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena ditemukan penelitian oleh Suryani (2021) adanya praktik periode Jokowi bertujuan melanggengkan oligarki dan adanya fenomena lemahnya partisipasi politik masyarakat (Siagian & Permatasari, 2022). Tekad untuk memastikan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik, negara demokrasi sejatinya harus benar-benar membuka keran politik seluas-luasnya (Gunanto, 2020). Fenomena mengenai demokrasi dan isu kewacanaan pejabat negara dapat ditemukan sehari-hari, berdasarkan penelitian yang dilakukan Siagian (2022) menyatakan masyarakat mengalami kemerosotan dalam keikutsertaan politik, karena didasari faktor substantif. Selain itu penelitian yang membahas wacana kritis pidato pejabat publik di kancah Internasional Islamophobia di Barat pada pidato Perdana Menteri Pakistan (Javaid dkk., 2022), Suharya (2021) membahas wacana kritis strategi Presiden Jokowi dalam pidato yang dibangun, membongkar ideologi nasionalisme, dan ideologi kerakyatan yang dibangun pada Hari Guru Nasional 2020. Penelitian tentang wacana presiden sebelumnya juga pernah dilakukan (Mozefani dkk., 2020) Mahadian (2023) polarisasi terjadi lebih komplek di akar rumput.

Lebih lanjut, adanya penjabaran temuan indeks partisipasi politik masyarakat rendah dalam pemilu periode jabatan Presiden Jokowi (Siagian & Permatasari, 2022). Termuat dalam penelitian Siagian dan Permatasari (2022) menjabarkan penyebab tersebut didasari adanya delapan faktor substantif yaitu rendahnya atensi politik masyarakat, keterbatasan edukasi politik kepada rakyat, partisipasi politik rakyat bersifat tidak aktif dan rasa acuh total, rekrutmen partai politik pada kandidasi calon pemimpin, rakyat tidak memiliki kepercayaan terhadap calon pemimpin, lemahnya penyebaran sistematis oleh komisi pemilihan umum terhadap rakyat tentang pentingnya penggunaan suara mereka dalam menentukan kondisi daerah, pemutakhiran data pemilihan, dan tingginya modus transaksi atau dikenal politik uang calon pemimpin kepada rakyat. Adanya jug apraktik oligarki(Suryani dkk., 2021) Dengan demikian, penelitian ini memiliki pendalaman yang penting dalam memahami dan menganalisis pidato politik serta kebijakan politik presiden bagaimana pemimpin negara mengkonstruksi bahasa dan retorika dalam konteks ideologi didalamnya. Tujuan penelitian ini berfokus kepada retorika presiden Jokowi pada pra tahun politik 2024 melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis model Teun A Van Dijk mencoba untuk membongkar ideologi presiden Jokowi yang dibangun di dalamnya. Berdasarkan tujuan penelitian mengkaji retorik presiden Jokowi pada masa pra tahun politik melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis model Teun A Van Dijk merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- A. Bagaimana teks wacana keberlanjutan kepemimpinan nasional dalam pidato presiden Jokowi menjelang pemilu 2024?
- B. Bagaimana konteks wacana keberlanjutan kepemimpinan nasional dalam pidato presiden Jokowi menjelang pemilu 2024?
- C. Bagaimana Kognisi sosial wacana keberlanjutan kepemimpinan nasional dalam pidato presiden Jokowi menjelang pemilu 2024?

## II. TINJAUAN LITERATUR

### A. Praktik Demokrasi Presiden Jokowi

Survei demokrasi ini menunjukkan adanya perubahan dalam Kesimpulannya, ketiga laporan demokrasi ini menunjukkan adanya perubahan pola demokrasi. Dahulu merupakan demokrasi elektoral, Indonesia kini bergerak menuju "demokrasi yang cacat (Jati, 2021) Kondisi demokrasi politik Indonesia sedang terpolarisasi (Fossati & Warburton, 2022)

Winter (2011) mendefinisikan Oligarki sebuah gerakan sistem hubungan kekuasaan atau kuasa perintah yang otoritasnya dipegang oleh sekumpulan kelompok/ aktor intelektual(dalam Suryani dkk., 2021). Demokrasi Indonesia secara signifikan lebih dibentuk dan dibatasi oleh kekuatan uang oligarkis daripada demokrasi yang tanpa pengaruh kekayaan (Winters, 2013). Kajian mengenai definisi demokrasi sudah banyak diteliti, dan definisinya sangat beragam, Salah satu peneliti terdahulu Uhlin (1993) Demokrasi adalah Sistem yang berlandaskan kesetaraan politik, dan adanya Lembaga pengawasan (Dalam Suryani dkk., 2021). Demokrasi sangat menjunjung kebebasan berekspresi semua warga negara, dan demokrasi terdiri dari tiga lembaga sentral negara, legislatif penyusun undang-undang, eksekutif lembaga yang menjalankan roda pemerintahan, yudikatif lembaga pengawasan atau lembaga hukum negara (Yani, 2018). Esensi dari sebuah demokrasi adalah fokus pada kedaulatan dan faktor kunci terletak pada keikutsertaan rakyat dalam partisipasi demokrasi. Oligarki Didefinisikan sebagai bentuk perlawanan dari demokrasi, menurut Kamus resmi berbahasa Indonesia menyatakan kekuasaan pemerintah dipimpin oleh kelompok tertentu yang mendominasi. Peneliti terdahulu Winter (2011) mendefinisikan Oligarki sebuah gerakan sistem hubungan kekuasaan atau kuasa perintah yang otoritasnya dipegang oleh sekumpulan kelompok/ aktor intelektual (dalam Suryani dkk., 2021). Sedangkan definisi lain dari Oligarki bentuk penggabungan kelimpahan kekayaan dan power politik (Robison dan Hadis dalam Suryani dkk., 2021). Kedua penggabungan memiliki tujuan yang sama bahwa proses demokratisasi tidak melemahkan oligarki dalam peranan strategis. Kekayaan menjadikan oligarki dan demokrasi terpolarisasi Ketika datang untuk mempengaruhi hasil politik masyarakat, kekayaan adalah sumber daya

yang paling kuat dan mudah beradaptasi dengan karakter masyarakat Indonesia, dan elite politik yang menggunakannya memiliki pengaruh politik yang lebih kuat daripada mereka yang menggunakan demokrasi yang didasari meritokrasi (Winters, 2013). Oligarki harus menjadi pusat pengkajian politik Indonesia. Demokrasi Indonesia secara signifikan lebih dibentur dan dibatasi oleh kekuatan uang oligarkis daripada demokrasi yang tanpa pengaruh kekayaan (Winters, 2013). Hal tersebut didukung penelitian Sarjana Suryani (2021) bahwa praktik oligarki masih kuat dan polarisasi terjadi semakin dominan pada lapisan elite politik maupun akar rumput (A. B. Mahadian & Hashim, 2022). Aspinal (2019) Kandidat yang memenangkan pemilu biasanya menjunjung tinggi kepentingan organisasi politik dan bisnis yang berada di belakangnya

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini membahas “Wacana Keberlanjutan Kepemimpinan Nasional Sebagai Praktik Oligarkis Dalam Pidato Presiden Jokowi Menjelang Pemilu 2024” diawali dari penjelasan alur paradigma. Paradigma merupakan cara pandang sesuai dengan yang dipikirkan atau apa yang dibayangkan tentang peristiwa di dunia (Abdussamad, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma kritis, Dalam paradigma kritis, dititik beratkan memeriksa elemen lain dari topik penelitian, dengan selalu mempertimbangkan konteks secara keseluruhan . Paradigma kritis melalui Analisis Wacana Kritis bukan hanya berfokus pada teks elemen lain diberikan penekanan yang kuat ada melakukan penyelidikan kritis terhadap aspek sosial dan budaya, struktur kekuasaan, ideologi, dan kelumrahan social yang berlaku (Kartika, 2020). Paradigma kritis diesensikan mampu meningkatkan kesadaran sosial supaya mampu memperbaiki dan mengubah kondisi manusia (Kartika, 2020).

Alat analisis kualitatif terletak pada Peneliti manusia itu sendiri sebagai instrumen analitis (Ahyar dkk., 2020). Salah satu alat atau instrumen kunci adalah kemampuan tubuh dan jiwa untuk mengamati, menyelidiki, menelusuri, dan mengabstraksi. Dalam prosesnya untuk mempertajam analisis Peneliti mengait Analisis Wacana Kritis dari tokoh belanda Teun A Van Dijk menjadi alat ukur penelitian untuk menganalisis struktur teks, konteks sosial, dan kognisi sosial pada pidato politik Presiden Jokowi periode pra tahun politik 2024.

Tabel 1. Unit Analisis Data

Unit Analisis	Sub Analisis
	Teks
Analisis Wacana Kritis Model Teun A Van Dijk	Konteks Sosial
	Kognisi Sosial

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan penelitian berdasarkan alat analisis Analisis Wacana Kritis Model Teun A Van Dijk akan di tambikan berupa tabel

Tabel 2. Tabel Temuan

	Temuan
Teks	(penggunaan diksi, gerbong, nahkoda pasien menggunakan bahasa leksikal), penggunaan skema pidato pembuka, isi, penutup
Kontek sosial	Bergabungnya Perindo ke PDIP, pasca presiden Jokowi menyampaikan pidato, Gibran menjadi Capres & cawapres
Kognisi Sosial	Penggunaan narasi kami bangsa-bangsa besar

#### A. Analisis konteks Teks

Berdasarkan hasil penelitian Pada bagian leksikon peneliti berusaha melengkapi penelitian Mozefani (2020) leksikon erat kaitannya dengan pilihan kata. Presiden Jokowi terdapat pada bagian isi pidato, muatan di dalam pesan pidato tersebut Jokowi sering menggunakan kata-kata yang mengindikasi karakter pemimpin masa depan, ancaman situasi, dan pengikut tokoh (berani, pemberani, pasien, nahkoda, gerbong) Peneliti menilai hal tersebut kepiawaian Jokowi memberikan pesan khusus dengan pilihan kata secara implisit bentuk pemilihan diksi pada tiga video analisis tersebut.

#### B. Analisis Kontek Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian Aspinal (2019) Pada penelitian yang dilakukan aspinal tidak membahas secara mendalam siapa aktor elit yang sedang melanggengkan oligarki. Penelitian ini menawarkan temuan presiden Jokowi sedang mempromosikan tokoh nasional kepada partai politik yang otoritasnya sebagai oligarki, dan mengedepankan konteks waktu pada periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi merestui putra dan menantu presiden Jokowi bergabung ke partai PDI-Perjuangan dan satu putra bungsu menjadi ketua umum partai

PSI. Presiden Jokowi mencoba menawarkan kepada masyarakat apakah trah Jokowi dikehendaki untuk menjadi pejabat publik. Hal tersebut menguatkan proses politik feodalistik, oligarkis dan demokrasi berjalan beriringan di masa periode kedua presiden Jokowi.

Penelitian ini menawarkan untuk melengkapi data dari penelitian Suryani (2021) mengenai penguatan oligarki menyempitkan ruang keterlibatan civil society dalam tata kelola SDA, selain itu peneliti menawarkan dan menjadi perspektif alternatif untuk menggugah kajian tata kelola sumber daya manusia, titik poinnya pada kesadaran politik setiap dari semua warga Indonesia bahwa kepada kelompok elite siapa yang masyarakat percaya untuk mengelola Sumber Daya Alam, yang mampu mengimplementasi amanat undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelitian ini melanjutkan penelitian Mahadian mengenai polarisasi terjadi lebih kompleks di akar rumput (A. D. I. B. Mahadian, 2023) dan penelitian ini akan memberikan perspektif lanjutan bahwa dari presiden Jokowi sedang berupaya melalui kemampuan retorikanya mengupayakan adanya oligarki kepentingan dengan meredam polarisasi dengan wacana keberlanjutan, ditunjukkan anak presiden Jokowi maju pada gelaran pemilihan presiden 2024.

### C. Analisis Kognisi Sosial

Penelitian ini menganalisis praktik demokrasi sekarang mendorong adanya praktik polarisasi masih terjadi akibat dari kecenderungan oligarki kepentingan (Fossati & Warburton, 2022). Peneliti menilai adanya celah kebaruan atas adanya wacana keberlanjutan dalam diskusi akademik komunikasi politik dengan adanya upaya yang dilakukan oleh presiden Jokowi dan kelompok oligarkinya yang seolah-olah sedang meredam polarisasi.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan proses penelitian yang panjang peneliti dengan mengedepankan penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan paradigma kritis. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa presiden Jokowi sedang berupaya melakukan praktik wacana keberlanjutan kepemimpinan yang didasari adanya niatan praktik oligarki. Hal tersebut disinyalir ketika mendatangi pidato politik bersama relawan dan partai pendukung pemerintahan, diperkuat tidak hadirnya presiden Jokowi dalam HUT partai Nasdem.

- A. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dianalisis presiden Jokowi pada teks sosial presiden Jokowi memiliki konsep yang sama seperti tokoh politik lainnya dengan ditunjukkan dengan diksi konjungsi dan kata ganti, serta melakukan skema pidato pembuka, isi, penutup untuk menyampaikan tujuan komunikasinya,
- B. Pada bagian konteks sosial berada pada dua situasi, menjadi elite politik dan tamu undangan. Presiden Jokowi piawai dalam melakukan pengaruh untuk memperkuat adanya feodalistik, oligarki, dan demokrasi di periode kedua presiden Jokowi menjabat
- C. Pada bagian kognisi sosial peneliti membongkar dengan penggunaan kalimat narasi merangkul yang menjadi anggapan umum di masyarakat dalam upaya keberlanjutan kepemimpinan dengan mempromosikan nama-nama tokoh pada partai politik yang di dalam acara tersebut dihadiri adanya ketua umum dan jajaran yang menjadi kelas ordinar (elite politik) yang memegang andil menentukan sikap arah politik sebuah partai dalam pesta demokrasi dan kepada relawannya, Jokowi menaikkan wacana keberlanjutan mengusahakan memberi pengaruh untuk satu suara dengan arahan presiden Jokowi hal tersebut salah satu upaya meredam polarisasi.

## REFERENSI

- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. syakir Media Press, 2022.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March).
- Aspinall, E. & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia & KITLV-Leiden.
- Fossati, D., & Warburton, E. (2022). Why democrats abandon democracy : Evidence from four survey experiments. June 2020. <https://doi.org/10.1177/1354068821992488>
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 8(2), 177–191. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>
- Jati, W. R. (2021). Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021. The Habibie Center THC Insights, 27, 6. [www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id)
- Javaid, M., Khan, M. H., Kaur, S., & Qazalbash, F. (2022). Islamophobia in the West: A Critical Discourse Analysis of Imran Khan's UNGA Speech. Religions, 13(4), 0–16. <https://doi.org/10.3390/re13040284>
- Kartika, S. (2020). Analisis Wacana Kritis Nourman Fairlough terhadap Pemberitaan Jokowi Naikkan Iuran BPJS di Jawa Tengah. Jurnal An-Nida, 12(2), 113–124. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JKIN/article/viewFile/1608/1481>
- Mahadian, A. B., & Hashim, R. (2022). Political Internet Memes in Indonesia : Insulting the President in the 2019 Presidential Election. Journal of Contemporary Media and Communication, 2016(January), 27–57.

Mahadian, A. D. I. B. (2023). Articulating Islamist Sectarian Group Antagonism Memes on the Indonesian Politics. 39(3), 124–144.

Mozefani, F., Prisant, G. F., Ernungtyas, N. F., & Irwansyah. (2020). Retorika Politik Susilo Bambang Yudhoyono : Pendekatan Political Retorics of Susilo Bambang Yudhoyono : Approach Critical Discourse Analysis. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, III(I), 45–68.

Siagian, A. M., & Permatasari, Y. (2022). Insecurisme Politik Rakyat Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Populika*, 10(1), 10–23. <https://doi.org/10.37631/populika.v10i1.380>

Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi'i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2021). KEMUNDURAN DEMOKRASI TATA KELOLA SDA : PENGUATAN OLIGARKI DAN PELEMAHAN PARTISIPASI DEMOCRACY SETBACK IN NATURAL RESOURCE GOVERNANCE : Pendahuluan Demokrasi , Civil Society , dan Oligarki dalam Tata Kelola SDA. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173–189.

Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, 2013(96Special Issue), 11–33. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099>

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>

